JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 11 Maret 2026 | **Revised**: 10 April 2026 | **Accepted**: 19 April 2026

Mengukur Efektivitas Penindakan Kenakalan Remaja Sekolah Oleh Pemerintah Kota Batam

Nenny Dwiyana[1], Rizki Tri Anugrah Bhakti[2*], Indra Sakti[3], Seftia Azrianti[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia. dwiyananenny@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia. rizkitri@fh.unrika.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia. indrasakti12680@gmail.com
[4]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia. seftiaazrianti2@gmail.com

Corresponding Author: rizkitri@fh.unrika.ac.id

Abstract: *Juvenile delinquency in Batam City, including truancy, loitering during school hours and violations of regulations, has become a problem that impacts the order of learning and the tranquility of public spaces. The Batam City Government responds through enforcement and student supervision during school hours. However, the effectiveness of the policy needs to be assessed not only from the intensity of operations, but also the mechanisms that explain behavioral changes. This study aims to examine the effect of the effectiveness of government enforcement (X) on student behavioral outcomes (Z) by placing legitimacy/procedural justice (Y) as a mediator. The study used an explanatory quantitative approach with a survey of 100 high school/vocational high school students in Batam and was analyzed using SEM-PLS (SmartPLS). The indicators meet the feasibility of the outer loading measurement model ≥0.70, construct reliability α 0.722-0.765; CR 0.703-0.784 and convergent validity AVE 0.625-0.642. The results of the structural model show a strong and significant direct effect of X-Y (β=0.828; t=45.543; p<0.001) and Y-Z (β=0.735; t=10.730; p<0.001) and a significant indirect effect of X-Y-Z (β=0.609; t=10.593; p<0.001), confirming the mediating role of legitimacy/procedural justice. The findings indicate that consistent enforcement, in accordance with SOPs, accompanied by clear explanations and follow-up, is more effective in building perceptions of justice, thus supporting student compliance with school order or reducing the tendency for delinquency. Practically, Batam's policy needs to emphasize quality procedures, respectful communication,and guidance-based follow-up mechanisms.*

Keywords: *Enforcement, Effectiveness, Procedural justice, Legitimacy, Juvenile Delinquency, Batam*

Abstrak: Kenakalan remaja sekolah di Kota Batam meliputi membolos, berkeliaran pada jam pelajaran dan pelanggaran tata tertib menjadi persoalan yang berdampak pada ketertiban belajar dan ketenteraman ruang publik. Pemerintah Kota Batam merespons melalui penindakan, pengawasan pelajar pada jam sekolah, namun efektivitas kebijakan perlu dinilai tidak hanya dari intensitas operasi, melainkan mekanisme yang menjelaskan perubahan perilaku. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh efektivitas penindakan pemerintah (X)

terhadap luaran perilaku siswa (Z) dengan menempatkan legitimasi/keadilan prosedural (Y) sebagai mediator. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan survei pada 100 siswa SMA/SMK di Batam dan dianalisis menggunakan SEM-PLS (SmartPLS). Indikator memenuhi kelayakan model pengukuran outer loading ≥0.70, reliabilitas konstruk α 0.722-0.765; CR 0.703-0.784 dan validitas konvergen AVE 0.625-0.642. Hasil model struktural menunjukkan pengaruh langsung yang kuat dan signifikan X-Y (β=0.828; t=45.543; p<0.001) serta Y-Z (β=0.735; t=10.730; p<0.001) dan efek tidak langsung X-Y-Z signifikan (β=0.609; t=10.593; p<0.001) menegaskan peran mediasi legitimasi/keadilan prosedural. Temuan mengindikasikan bahwa penindakan yang konsisten, sesuai SOP, disertai penjelasan dan tindak lanjut yang jelas lebih efektif ketika membangun persepsi keadilan, sehingga mendukung kepatuhan siswa terhadap ketertiban sekolah atau penurunan kecenderungan kenakalan. Secara praktis, kebijakan Batam perlu menekankan kualitas prosedur, komunikasi yang menghormati dan mekanisme tindak lanjut berbasis pembinaan.

Kata Kunci: Penindakan, Efektivitas, Keadilan Prosedural, Legitimasi, Kenakalan Remaja, Batam

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja sekolah merupakan problem sosial–pendidikan yang berulang dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, rasa aman di lingkungan sekolah serta ketertiban di ruang publik. Dalam praktiknya, ini tidak hanya muncul sebagai pelanggaran tata tertib sekolah-seperti membolos dan pelanggaran jam belajar, tetapi juga dapat bereskalasi menjadi perilaku agresif, konflik antarsiswa, hingga tindakan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Literatur psikologi perkembangan dan perilaku menyimpang menegaskan bahwa kenakalan remaja berakar pada kombinasi faktor internal dan eksternal, yaitu lemahnya kontrol diri sebagai faktor internal serta pengaruh teman sebaya/konformitas sebagai faktor eksternal yang sering kali memperkuat kecenderungan pelanggaran norma (Hidayah, 2020).

Dalam konteks pemerintahan daerah, fenomena tersebut menempatkan pemerintah pada posisi strategis sekaligus dilematis: pemerintah dituntut menjamin ketertiban umum dan perlindungan anak secara bersamaan, sementara respons yang tersedia sering kali bercorak penindakan operasi penertiban, razia pelajar bolos, pembatasan aktivitas pada jam sekolah, hingga pembinaan pasca-penjangkauan. Kajian Angkasawati (2022) menunjukkan penanganan oleh perangkat pemerintah khususnya aparat penegak ketertiban umum dirancang sebagai rangkaian tindakan yang memadukan koordinasi lintas instansi, sosialisasi, penertiban/razia dan pembimbingan/pembinaan; bahkan beberapa studi mendokumentasikan bahwa bentuk kenakalan yang dominan pada populasi pelajar yang dijangkau adalah membolos sekolah.

Namun, orientasi penindakan yang terlalu menekankan aspek penjangkauan dan kontrol berisiko memunculkan resistensi, terutama bila interaksi di lapangan dipersepsi tidak adil atau mempermalukan. Studi komunikasi sosial tentang praktik penertiban pelajar menggambarkan polemik interaksi mulai dari ketidakkooperatifan yang mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan tidak semata ditentukan oleh intensitas operasi, melainkan juga oleh kualitas prosedur dan penerimaan sosial terhadap otoritas (Indrawati, 2023; Tyler et al., 2015). Karena itu, diskursus efektivitas penindakan perlu memasukkan dimensi legitimasi dan keadilan prosedural. Kerangka *procedural justice* menekankan kepatuhan terhadap aturan dan penerimaan terhadap otoritas lebih mungkin terbentuk ketika masyarakat memandang proses penegakan sebagai adil, hormat dan dapat dipertanggungjawabkan bukan semata-mata keras atau represif (Wenzel & Okimoto, 2016).

Secara empiris, Farrington et al (2017) menunjukkan penurunan perilaku menyimpang remaja lebih konsisten dicapai melalui pendekatan yang menarget faktor risiko individual,

keluarga dan sekolah, bukan hanya melalui tindakan penertiban sesaat. Tinjauan atas ulasan program pencegahan perkembangan menunjukkan intervensi pada level individu, keluarga dan sekolah secara umum efektif menurunkan luaran seperti *delinquency*, agresi dan *bullying*. Selain itu, perspektif *routine activity* menegaskan pentingnya pengawasan efektif pengurangan peluang dan pengaturan rutinitas yang relevan dengan konteks pelajar bolos dan aktivitas di ruang publik pada jam sekolah (Mohammad & Nooraini, 2021; O & Wilcox, 2018). Temuan-temuan ini memberi implikasi bahwa penindakan pemerintah akan lebih berdaya guna bila terhubung dengan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang memperbaiki rutinitas, relasi sekolah–keluarga serta kontrol diri remaja, bukan berhenti pada penertiban administratif.

Di sisi lain, bukti kuantitatif menunjukkan bahwa peningkatan kualitas prosedur dalam praktik penegakan dapat menghasilkan luaran yang terukur. Misalnya, penelitian eksperimental pada pelatihan *procedural justice* menemukan dampak pada penurunan keluhan terhadap aparat dan penggunaan kekuatan dalam periode tindak lanjut tertentu, yang memperkuat argumen bahwa cara menegakkan mempengaruhi hasil dan kepercayaan publik (Wood et al., 2020). Dengan demikian, menilai efektivitas penindakan kenakalan remaja sekolah oleh pemerintah tidak cukup dilakukan dengan indikator *output*, tetapi harus bergeser pada indikator *outcome* dan mekanisme: perubahan perilaku, peningkatan kepatuhan jam belajar, penguatan kolaborasi sekolah–orang tua–pemerintah serta persepsi keadilan prosedural yang mencegah resistensi.

Masalah utama dalam studi-studi kebijakan penertiban pelajar di Indonesia adalah masih dominannya pendekatan deskriptif kualitatif yang kuat dalam pemetaan peran dan hambatan, tetapi relatif terbatas dalam pengukuran efek atau evaluasi kuantitatif berbasis indikator hasil yang ketat. Misalnya, studi yang mendeskripsikan kinerja penertiban dengan parameter rutinitas patroli bulanan dan penilaian sudah baik, namun belum menguji secara kuantitatif seberapa jauh penindakan menurunkan pelanggaran dan pada kondisi apa dampaknya paling signifikan (Muklir & Mustika, 2020). Kesenjangan ini penting ditutup karena kebijakan penindakan menyangkut penggunaan kewenangan publik, alokasi sumber daya serta potensi konsekuensi sosial bagi anak.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini menguji secara kuantitatif hubungan antara intensitas-kapasitas penindakan dan perubahan luaran kenakalan remaja sekolah serta menilai peran faktor psikososial yang meliputi kontrol diri dan pengaruh teman sebaya dan faktor prosedural keadilan prosedural-legitimasi sebagai penjelas mengapa penindakan berhasil atau tidak. Basis teoretik tentang kontrol diri dan konformitas membantu menjelaskan kerentanan perilaku pada level individu, sementara bukti tentang efektivitas intervensi perkembangan dan *procedural justice* memperkuat desain evaluasi yang tidak reduktif pada razia semata.

Secara konseptual, penindakan kenakalan remaja diposisikan sebagai instrumen kebijakan ketertiban yang bekerja melalui dua jalur utama, yaitu kepatuhan berbasis risiko (*deterrence*) dan kepatuhan berbasis legitimasi (*legitimacy-based compliance*). Jalur legitimasi menekankan penindakan yang dipersepsikan adil secara prosedural meningkatkan penerimaan sosial terhadap otoritas, memperkuat kemauan patuh serta menurunkan perilaku melanggar. Bukti sintesis menunjukkan intervensi kepolisian/otoritas dirancang untuk meningkatkan legitimasi berdampak pada kepuasan, kepercayaan dan kepatuhan serta memberi efek pada penurunan *reoffending* (Liu et al., 2024; Wood et al., 2020). Temuan lapangan memperlihatkan pelatihan *procedural justice* pada aparat berkaitan dengan penurunan penggunaan kekuatan dan keluhan terhadap petugas ; karena itu, dalam model kuantitatif, kualitas penindakan tidak cukup diukur dari intensitas/frekuensi, tetapi juga konsistensi, kepatuhan SOP dan kualitas *procedural justice*.

Pada level remaja sekolah, efektivitas penindakan juga sangat dipengaruhi faktor perilaku-perkembangan yang membentuk kerentanan melakukan pelanggaran. McGloin &

Thomas (2019) menegaskan peran kuat dan pengaruh teman dalam hal seleksi–sosialisasi, termasuk situasi tanpa pengawasan yang memfasilitasi deviasi dalam membentuk dan mempertahankan kenakalan. Di sisi lain, menunjukkan *self-control* berkaitan erat dengan kecenderungan deviasi; individu dengan kontrol diri rendah cenderung lebih impulsif dan kurang responsif pada konsekuensi jangka panjang (Vazsonyi et al., 2017).

Ini mengimplikasikan bahwa dampak penindakan pemerintah pada penurunan kenakalan berpotensi melemah ketika remaja berada dalam lingkungan teman sebaya yang devian dan/atau memiliki kontrol diri rendah. Dengan demikian, model konseptual yang lebih kuat menempatkan persepsi legitimasi/keadilan prosedural sebagai mekanisme penjelas, sementara kontrol diri dan teman sebaya devian sebagai kondisi yang menguatkan atau melemahkan dampak penindakan.

Konteks empiris Indonesia mendukung pentingnya dimensi kualitas dan kolaborasi dalam penindakan. Muklir & Mustika (2020) dan Tibrani et al (2024) menjelaskan praktik patroli/razia rutin, koordinasi lintas aktor, sekaligus kendala anggaran serta sarana prasarana yang secara konseptual relevan sebagai indikator kapasitas implementasi penindakan. Studi Angkasawati (2022) dan Indrawati (2023) menekankan aspek komunikasi pendekatan operasional dalam penertiban pelajar melalui program operasi berbasis pembinaan yang memengaruhi penerimaan dan kepatuhan. Sementara itu, Farrington et al (2017) menempatkan tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pembinaan pelajar dalam kerangka ketertiban umum. Konsisten dengan sintesis pencegahan, penurunan kenakalan yang lebih berkelanjutan cenderung terjadi ketika intervensi penertiban terhubung dengan strategi pencegahan yang lebih luas yaitu faktor keluarga–sekolah–komunitas.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Operasional	Indikator	Item
X–Penindakan Pemerintah Kota Batam	Tingkat keterlaksanaan penindakan pada jam sekolah di Batam yang dipersepsikan konsisten, sesuai SOP, jelas dan tertib, sehingga mendorong kepatuhan pelajar terhadap aturan	X1.1	Penindakan pelajar pada jam sekolah di Batam dilakukan secara konsisten
		X1.2	Penindakan dilakukan pada waktu dan lokasi yang relevan
		X1.3	Petugas menjalankan penindakan/pengawasan secara tertib sesuai prosedur
		X1.4	Petugas menjelaskan alasan penindakan kepada pelajar yang terjaring
		X1.5	Tindakan disertai arahan tindak lanjut yang jelas
Y-Legitimasi/Keadilan Prosedural	Proses penindakan berlangsung adil, netral, menghormati, memberi ruang menjelaskan, sehingga otoritas pemerintah dipandang legitim dan patut dipatuhi	Y1.1	Petugas memperlakukan pelajar dengan sopan dan menghormati martabat
		Y1.2	Petugas tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan atau mempermalukan
		Y1.3	Petugas bersikap netral dan tidak pilih kasih dalam menindak pelajar
		Y1.4	Pelajar diberi kesempatan menjelaskan alasan atau situasinya sebelum keputusan diambil
		Y1.5	Penindakan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan, bukan untuk kepentingan tertentu
Z – Kenakalan Remaja Sekolah	Frekuensi perilaku pelanggaran terkait ketertiban dalam periode waktu tertentu	Z1.1	Saya membolos sekolah tanpa alasan yang jelas
		Z1.2	Berada di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa izin
		Z1.3	Berkumpul di tempat umum pada jam sekolah
		Z1.4	Melanggar aturan sekolah yang sudah diketahui
		Z1.5	Terlibat perilaku mengganggu ketertiban di lingkungan sekolah

Berdasarkan kerangka di atas, rumusan hipotesis kuantitatif penelitian sebagai berikut:
H1: Efektivitas penindakan (X) berpengaruh terhadap kenakalan remaja sekolah (Z).

H2: Efektivitas penindakan (X) berpengaruh terhadap legitimasi/keadilan prosedural (Y).
H3: Legitimasi prosedural (Y) berpengaruh terhadap kenakalan remaja sekolah (Z).
H4: Legitimasi prosedural (Y) memediasi pengaruh efektivitas (X) terhadap kenakalan (Z).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan tujuan menguji pengaruh Efektivitas Penindakan Kenakalan Remaja Sekolah oleh Pemerintah terhadap Kenakalan Remaja Sekolah serta menguji mekanisme mediasi. Kerangka pengujian didasarkan pada literatur *procedural justice* yang menekankan kepatuhan berbasis legitimasi, di mana kualitas interaksi penegakan memengaruhi penerimaan otoritas dan perilaku patuh.

Lokasi penelitian ditetapkan pada wilayah administrasi pemerintah kota Batam yang secara aktif menjalankan program penertiban pelajar (razia membolos, patroli jam sekolah, penjangkauan di tempat umum). Populasi penelitian adalah siswa 100 SMA/SMK pada sekolah yang berada di wilayah intervensi kebijakan penindakan. Unit analisis adalah individu siswa karena variabel kunci persepsi keadilan prosedural/legitimasi, kontrol diri, pengaruh teman sebaya dan perilaku kenakalan)bersifat psikososial dan paling tepat diukur pada level individu. Konteks operasional penindakan dan bentuk intervensi pemerintah dalam penertiban pelajar (razia/patroli, koordinasi lintas instansi, pembinaan) diposisikan sebagai dasar penyusunan indikator konstruk penindakan dan prosedur pengumpulan data lapangan.

Teknik sampling dan ukuran sampel. Sampel diambil dengan multistage cluster sampling: (1) memilih sekolah secara klaster dalam wilayah penelitian; (2) memilih kelas secara acak proporsional; (3) memilih siswa dalam kelas terpilih. Untuk analisis model jalur yang memuat mediasi, ukuran sampel ditetapkan agar memadai untuk estimasi parameter dan uji bootstrap; secara praktis 100 responden terlibat untuk pengujian model struktural dan interaksi serta memungkinkan robustness check melalui multi-group analysis

Konstruk Efektivitas Penindakan Pemerintah (X) dioperasionalkan sebagai konstruk laten multidimensi yang mencakup: (a) intensitas dan konsistensi penindakan, (b) kepatuhan pada SOP/ketertiban prosedural (McGloin & Thomas, 2019) dan (c) kualitas interaksi penegakan yang merefleksikan *procedural justice*. Basis teoretik merujuk pada bukti *procedural justice* dalam praktik penegakan dapat menurunkan keluhan/koersi dan meningkatkan outcome yang diharapkan (Mazerolle et al., 2013; Wood et al., 2020).

Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala Likert (1–5) untuk konstruk laten. Instrumen disusun melalui adaptasi indikator yang diadopsi pada pendahuluan dan konseptual framework tentang *procedural justice*/legitimacy serta self-control dan peer influence, kemudian dikontekstualkan pada praktik penindakan pelajar yang dijalankan pemerintah daerah. Uji validitas konstruk dan reliabilitas dilakukan pada tahap analisis: outer loading, Cronbach's alpha, composite reliability dan AVE; serta uji discriminant validity (HTMT). Untuk mengantisipasi bias metode umum dilakukan pengendalian prosedural dan pengujian statistik.

Teknik analisis data dan pengujian mediasi. Analisis dilakukan menggunakan SEM-PLS (SmartPLS) karena model melibatkan konstruk laten dan pengujian jalur mediasi secara simultan. Tahap analisis meliputi: (1) evaluasi model pengukuran (reliabilitas–validitas), (2) evaluasi model struktural (koefisien jalur, R^2, effect size bila diperlukan) dan (3) pengujian mediasi melalui bootstrap untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari X terhadap Z melalui varaibel median Y. Mediasi dinyatakan terjadi apabila efek tidak langsung signifikan; selanjutnya sifat mediasi (parsial/penuh) ditentukan dari signifikansi jalur langsung X terhadap Z setelah mediator dimasukkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena kenakalan remaja sekolah seperti bolos, pelanggaran ketertiban umum, perkelahian/tawuran, vandalisme, hingga aktivitas berisiko di ruang publik masih menjadi isu yang relevan bagi pemerintah daerah karena berdampak langsung pada ketenteraman dan ketertiban umum, rasa aman masyarakat serta kualitas lingkungan belajar. Dalam konteks ini, penindakan oleh Pemerintah Kota Batam dipahami sebagai instrumen kebijakan untuk menekan intensitas dan eskalasi perilaku menyimpang remaja, sekaligus membentuk efek jera melalui mekanisme penegakan aturan yang terukur, proporsional dan akuntabel. Oleh karena itu, efektivitas penindakan perlu dibaca bukan sekadar sebagai keberhasilan tindakan sesaat, melainkan sebagai capaian kebijakan yang tercermin pada perubahan perilaku, penurunan kejadian berulang serta meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketertiban di ruang publik.

Tahap analisis diawali dengan evaluasi model pengukuran guna memastikan reliabilitas dan validitas konstruk sebagai prasyarat kualitas temuan kuantitatif. Sebagaimana dijelaskan Kapoor (2025); Latan & Ghozali (2015) and Sarstedt et al (2022), pendekatan PLS-SEM memiliki fleksibilitas kuat untuk menguji hubungan antar variabel secara simultan, terutama ketika ukuran sampel relatif terbatas serta tidak menuntut asumsi distribusi data yang ketat. Atas dasar itu, PLS-SEM dipandang sesuai untuk kebutuhan pengujian model penelitian ini, baik pada tahapan validasi konstruk maupun pengujian hubungan struktural.

Hasil analisis menunjukkan tidak adanya efek saling melemahkan antar indikator yang berpotensi menurunkan koefisien konstruk lain, sehingga korelasi antar variabel dalam model cenderung stabil dan konsisten. Dengan demikian, model pengukuran yang tervalidasi memberikan pijakan empiris yang memadai untuk menilai efektivitas penindakan kenakalan remaja sekolah oleh Pemerintah Kota Batam berdasarkan indikator-indikator yang diuji. Ringkasan hasil pengukuran tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Model Penghitungan Luar (Outer Model)

		Outer Loading	Cronbach Alpha	Composite Reliability	AVE
(X)			0.742	0.784	0.625
	X1.1	0.774			
	X1.2	0.735			
	X1.3	0.715			
	X1.4	0.732			
	X1.5	0.714			
(Y1)			0.722	0.711	0.632
	Y1.1	0.735			
	Y1.2	0.702			
	Y1.3	0.703			
	Y1.4	0.740			
	Y1.5	0.705			
(Z)			0.765	0.703	0.642
	Z1.1	0.814			
	Z1.2	0.732			
	Z1.3	0.752			
	Z1.4	0.759			
	Z1.5	0.761			

Secara umum, seluruh indikator pada tiga konstruk menunjukkan outer loading ≥ 0.70, sehingga kontribusi masing-masing item terhadap konstruknya dapat dinilai memadai–baik. Konstruk X (Efektivitas Penindakan): loading berkisar 0.714–0.774. Indikator paling kuat X1.1 (0.774), sedangkan yang relatif terendah X1.5 (0.714) dan X1.3 (0.715). Walau ada item yang mendekati batas minimal, semuanya tetap berada pada rentang yang layak sehingga tidak ada indikasi item lemah yang perlu dieliminasi secara otomatis. Selain itu, konsistensi internal menunjukkan sejauh mana indikator dalam satu konstruk mengukur hal yang sama secara

stabil. X memiliki nilai Cronbach's Alpha 0.742 dan Composite Reliability 0.784 yang menandakan bahwa baik/layak, menandakan indikator X konsisten.

Berbeda dengan temuan tersebut, adanya perdebatan dan pandangan berbeda yang muncul pada spesifikasi model pengukuran: efektivitas penindakan pada praktiknya merupakan konsep implementasi kebijakan yang bersifat multi-dimensi konsistensi operasi, kepatuhan SOP, kejelasan tindakan, tindak lanjut, sehingga sebagian peneliti berargumen bahwa indikator-indikatornya lebih tepat dipahami sebagai pembentuk daripada cerminan reflective (Muklir & Mustika, 2020; Schuberth, 2021).

Konstruk Y (Legitimasi/Keadilan Prosedural): loading berkisar 0.702–0.740. Indikator paling kuat Y1.4 (0.740), sedangkan yang terendah Y1.2 (0.702). Pola ini menunjukkan kekuatan indikator cukup merata, walau beberapa item berada pada level cukup (sekitar 0.70). Selain itu, Cronbach's Alpha 0.722 dan Composite Reliability 0.711 menandakan bahwa cukup dan memenuhi batas minimal. Nilai CR yang relatif dekat ambang menunjukkan konstruk Y sudah reliabel, tetapi masih pas-pasan, sehingga kualitas kalimat item dan keseragaman makna antar-indikator perlu dijaga pada tahap pelaporan. Secara kuantitatif, mendukung kesimpulan bahwa Y valid secara konvergen; tetapi secara konseptual angka yang pas-pasan membuka ruang perdebatan keadilan prosedural pada remaja sering bersifat heterogen karena terdiri dari beberapa elemen respek, netralitas, kesempatan menjelaskan dan kepercayaan pada motif otoritas yang tidak selalu bergerak seragam pada semua responden dan konteks (Li et al., 2024).

Literatur tentang hubungan *procedural justice–legitimacy* pada anak dan remaja juga menekankan adanya variasi operasionalisasi dan perbedaan konteks sosial yang dapat memengaruhi koherensi pengukuran, sehingga *loading* moderat dapat dipahami sebagai konsekuensi wajar dari konstruk persepsi yang kompleks (Chan et al., 2025). Di sisi lain, riset empiris menunjukkan bahwa *procedural justice* berperan sebagai mekanisme psikologis yang mendorong internalisasi aturan dan kepatuhan, sehingga mempertahankan Y sebagai konstruk laten tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan menjelaskan Y sebagai keadilan secara keseluruhan alih-alih memaksakan keseragaman antar-dimensi (Van Petegem et al., 2021).

Konstruk Z (Kenakalan Remaja Sekolah): *loading* berkisar 0.732–0.814. Indikator paling kuat Z1.1 (0.814) dan lainnya konsisten di atas 0.73. Dibanding X dan Y, konstruk Z memperlihatkan reliabilitas indikator paling solid. Konstruk Z memililki nilai Cronbach's Alpha 0.765 dan *Composite Reliability* 0.703 yang memiliki arti bahwasanya memenuhi batas minimal. Walaupun CR mendekati ambang, indikator Z tetap dapat dinilai reliabel karena (i) alpha cukup tinggi dan (ii) *loading* indikator relatif kuat.

Secara teknis, ini menguatkan indikator Z cukup representatif untuk menggambarkan perilaku kenakalan sebagai konstruk endogen. Namun, perdebatan ilmiah utama pada Z bukan semata statistik outer model, melainkan validitas substantif pengukuran perilaku sensitif. Ukuran kenakalan berbasis self-report rentan terhadap social desirability bias dan *underreporting*, terutama ketika responden merasa jawaban dapat menimbulkan konsekuensi sosial atau disipliner; bias ini menurunkan estimasi hubungan (*attenuation*) dan mengaburkan mediasi jika tidak diantisipasi melalui anonimitas, penekanan kerahasiaan serta pembatasan periode pelaporan (Kwak et al., 2021). Bahkan, studi dari Bezemer et al (2024) tentang survei kenakalan lintas negara menekankan pentingnya standardisasi item dan prosedur untuk meminimalkan distorsi pelaporan, sehingga interpretasi temuan perlu selalu disertai catatan metodologis tentang potensi bias respons dan strategi mitigasinya.

Akan tetapi secara secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa tidak ada indikator yang berada di bawah ambang kelayakan umum, sehingga seluruh item dapat dipertahankan untuk menjaga kelengkapan cakupan konsep (content validity). Ketiga konstruk memenuhi konsistensi internal yang dapat diterima. Namun, perlu ditekankan bahwa konstruk Y dan Z berada pada level reliabilitas minimal-*acceptable*, sehingga interpretasi tetap sah tetapi disarankan menjaga kehati-hatian pada generalisasi (Fathani et al., 2024; Podsakoff, 2000;

Putera et al., 2025). Terakhir, rata-rata AVE seluruh konsturk menunjukkan nilai yang berada diatas ambang batas >0.50, berarti validitas konvergen terpenuhi: masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikator, sehingga indikator memang "mengonvergensi" konstruk yang sama.

Berdasarkan *outer loading*, reliabilitas dan AVE, model pengukuran dinyatakan layak: indikator-indikator valid secara konvergen dan konstruk-konstruk reliabel untuk dilanjutkan ke evaluasi inner model yaitu uji jalur X-Y, Y-Z dan X-Z serta uji mediasi X-Y-Z (Hair et al., 2019; Sarstedt et al., 2022). Penguatan kualitas pelaporan, cukup beri catatan bahwa konstruk Y memiliki CR paling rendah, tetapi masih memenuhi kriteria minimal dan tidak ada indikator yang perlu dieliminasi karena semua sudah memadai.

Talel 3. Hasil Pengukuran (Inner Model)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values	F2	Confident Interval (95%)	
							2.5%	97.5%
Direct Effect								
X>Y	0.828	0.830	0.018	45.543	0.000	2.175	0.792	0.864
X>Z	0.715	0.710	0.249	10.730	0.000	0.407	0.507	0.574
Y>Z	0.735	0.740	0.069	10.730	0.000	0.807	0.607	0.874
Indirect Effect								
X>Y>Z	0.609	0.615	0.057	10.593	0.000		0.504	0.730

Selanjutnya, evaluasi inner model pada tabel 3 merupakan hasil penialain keterkaitan antar konstruk, ini menekankan pengujian signifikansi pengaruh langsung maupun tidak langsung, sekaligus menilai besar-kecilnya kontribusi (*effect size*) dari setiap hubungan dalam model. Sebelum menafsirkan koefisien jalur, penelitian ini memeriksa potensi multikolinearitas melalui uji Variance Inflation Factor (VIF) dengan acuan umum VIF < 5, untuk memastikan tidak ada tumpang tindih prediktor yang dapat mengaburkan estimasi dan memunculkan bias pada analisis.

Hasil pengujian menunjukkan model penelitian tidak mengalami multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF pada indikator/konstruk yang berada pada rentang 1.556 hingga 4.43, sehingga mengindikasikan parameter estimasi PLS-SEM yang stabil dan tidak terdistorsi. Nilai VIF dari X-Y-Z berada pada rentang 1.000 hinga 3.514. Dengan demikian, koefisien jalur model struktural dapat diinterpretasikan sebagai hubungan antar variabel tanpa kekhawatiran adanya kolinearitas yang melemahkan ketepatan estimasi.

Selanjutnya, tabel 3 menyajikan hasil bootstrapping yang merinci pengaruh antar variabel melalui informasi koefisien jalur, standar deviasi, statistik-t, interval kepercayaan 95%, nilai signifikansi (p-value) serta ukuran efek (F^2). Penentuan signifikansi hubungan merujuk pada ketentuan pengujian hipotesis yang umum digunakan dalam SEM-PLS (Chin, 1998; Sarstedt et al., 2019; Shmueli et al., 2019), sedangkan interpretasi F^2 mengikuti klasifikasi: 0.02 (kecil), 0.15 (sedang) dan 0.35 (besar), sehingga bukan hanya signifikan atau tidak, tetapi juga terlihat seberapa substantif kontribusi dari konstruk penelitian (Cohen, 1998; Fry & Cohen, 2009).

Temuan paling menonjol adalah hubungan X terhadap Y yang sangat kuat dan presisi tinggi (β=0.828; t=45.543; p=0.000; CI 95% 0.792–0.864). Secara substantif, ini menyiratkan bahwa ketika penindakan dan pengawasan pemerintah dipersepsikan efektif, persepsi legitimasi keadilan prosedural meningkat secara tajam. Ukuran efek F^2=2.175 menandakan pengaruh yang sangat besar. Secara teoretik, ini sejalan dengan literatur *procedural justice* yang menempatkan kualitas tindakan otoritas terutama konsistensi dan perlakuan yang adil sebagai dasar utama terbentuknya legitimasi dan penerimaan masyarakat (Wood et al., 2020). Bukti eksperimental pada konteks kepolisian menunjukkan bahwa intervensi berbasis

procedural justice dapat mengubah perilaku aparat sekaligus menurunkan keluhan publik dan penggunaan kekuatan, menandakan bahwa cara menegakkan berpengaruh langsung terhadap penilaian legitimasi (Ringle et al., 2023).

Hubungan Y-Z juga kuat dan signifikan (β=0.735; t=10.730; p=0.000; CI 95% 0.607-0.874), dengan ukuran efek F^2=0.807. Secara interpretatif, meningkatnya legitimasi/keadilan prosedural berkorelasi dengan perubahan bermakna pada variabel endogen kenakalan remaja sekolah. Terlepas dari isu arah, secara mekanisme teoritis, literatur luas menunjukkan bahwa *procedural justice* cenderung meningkatkan legitimasi dan legitimasi bukan sekadar rasa takut dihukum; melainkan menjadi kanal psikologis yang mendorong kepatuhan (Hasan et al., 2024). Bahkan penelitian kontemporer dari Chan et al (2025) juga menemukan bahwa pengaruh *procedural justice* terhadap niat patuh dapat lebih kuat melalui jalur legitimasi dibanding efek langsungnya.

Di sisi lain, instrumental-deterrence menekankan perilaku patuh sering lebih ditentukan oleh risiko tertangkap dan beratnya sanksi; sementara efek *procedural justice* dapat melemah pada desain longitudinal atau ketika kontrol-kontrol tertentu dimasukkan. Perdebatan ini penting menunjukkan jalur normatif (legitimasi) sangat dominan, tetapi tetap perlu mengakui bahwa pada sebagian konteks, terutama jika penindakan dipersepsi represif, kepatuhan bisa bersifat sementara dan tidak selalu bertransformasi menjadi internalisasi norma.

Pada aspek mediasi, tabel menunjukkan efek tidak langsung X terhada Z melalui Y yang besar dan signifikan (β=0.609; t=10.593; p=0.000; CI 95% 0.504–0.730). Artinya, terdapat bukti kuat pengaruh X terhadap Z mengalir terutama melalui Y: efektivitas penindakan meningkatkan legitimasi/keadilan prosedural, lalu legitimasi tersebut terkait dengan perubahan pada kenakalan. Secara akademik, ini memperkuat argumen bahwa "penindakan yang efektif" tidak cukup dipahami sebagai operasi razia semata, melainkan sebagai tata kelola tindakan otoritas yang dinilai adil, dapat dijelaskan dan tidak sewenang-wenang karena aspek itulah yang mengaktifkan kepatuhan berbasis legitimasi. Temuan juga resonan dengan Muklir & Mustika (2020) yang menekankan pentingnya pola operasi yang terencana, koordinasi dan pembinaan dalam penertiban pelajar; bukan sekadar tindakan koersif.

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari persoalan kenakalan remaja sekolah di Kota Batam yang tidak hanya berdampak pada tertib belajar dan rasa aman di sekolah, tetapi beririsan dengan ketertiban umum ruang publik. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Batam menjalankan penindakan pelajar pada jam sekolah sebagai instrumen kebijakan ketertiban. Namun, kajian ini menegaskan efektivitas penindakan tidak cukup dipahami sebagai intensitas operasi semata, melainkan harus dibaca melalui mekanisme yang menjelaskan mengapa penindakan dapat menghasilkan perubahan perilaku. Karena itu, model penelitian menempatkan legitimasi dan keadilan prosedural sebagai mediator yang menjembatani hubungan efektivitas penindakan dan luaran kenakalan remaja sekolah. Fokus ini konsisten dengan argumen teoretik kepatuhan dapat terbentuk bukan hanya karena rasa takut terhadap sanksi, tetapi penerimaan terhadap otoritas ketika tindakan penegakan dipandang adil, netral, menghormati dan dapat bertanggung jawab.

Secara metodologis, penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan SEM-PLS (SmartPLS) untuk menguji hubungan struktural dan mekanisme mediasi pada sampel siswa (n=100) di wilayah intervensi kebijakan penertiban. PLS-SEM relevan karena model memuat konstruk laten dan pengujian jalur mediasi secara simultan. Evaluasi model pengukuran menunjukkan seluruh indikator berada pada ambang kelayakan umum (outer loading ≥070) dan konstruk memenuhi reliabilitas serta validitas konvergen (AVE>0.50), sehingga model layak dilanjutkan ke pengujian struktural. Temuan ini menguatkan efektivitas penindakan konsistensi, relevansi waktu-lokasi, tertib prosedur, penjelasan alasan dan arahan

tindak lanjut serta legitimasi/keadilan prosedural respek, tidak mempermalukan, netralitas, kesempatan menjelaskan dan motif publik dapat digunakan sebagai ukuran persepsi kebijakan penindakan pada konteks pelajar.

Hasil pengujian model struktural memperlihatkan hubungan yang sangat kuat antara efektivitas penindakan (X) dan legitimasi/keadilan prosedural (Y). Koefisien jalur X terhadap Y bernilai tinggi dan signifikan ($\beta=0.828$; $p<0.001$) dengan ukuran efek yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa semakin konsisten, tertib, jelas serta sesuai prosedur penindakan yang dipersepsikan responden, semakin tinggi pula persepsi mereka bahwa tindakan pemerintah berlangsung adil dan patut ditaati. Dengan kata lain, kualitas pelaksanaan penindakan terutama aspek prosedural dan cara berinteraksi menjadi fondasi utama terbentuknya legitimasi.

Selanjutnya, legitimasi dan keadilan prosedural berhubungan signifikan dengan variabel kenakalan remaja sekolah (Z). Selain itu, efek tidak langsung X-Y-Z juga signifikan ($\beta=0.609$; $p<0.001$), sehingga secara empiris penelitian ini mendukung keberadaan mekanisme mediasi: penindakan yang dipandang efektif mendorong legitimasi dan legitimasi tersebut menjadi jalur penting yang menjelaskan keterkaitan penindakan dengan perubahan pada luaran kenakalan. Temuan ini memberi pesan kebijakan yang tegas: memperbanyak razia tanpa memperbaiki kualitas prosedur dan kualitas relasi otoritas–pelajar berisiko menghasilkan kepatuhan yang rapuh; sebaliknya, penindakan yang rapi, terukur, menjelaskan alasan, tidak mempermalukan dan disertai tindak lanjut yang jelas berpotensi membangun kepatuhan yang lebih berkelanjutan karena didorong penerimaan normatif, bukan sekadar ketakutan.

Implikasi praktis penelitian menekankan tiga prioritas. Pertama, penguatan SOP dan standar layanan penindakan yang ramah anak perlu diposisikan sebagai komponen inti efektivitas, bukan pelengkap. Kedua, desain penindakan harus selalu ditautkan dengan mekanisme tindak lanjut agar penertiban tidak berhenti sebagai tindakan administratif sesaat. Ketiga, pemerintah perlu membangun sistem evaluasi berbasis outcome agar efektivitas kebijakan tidak dinilai hanya dari frekuensi operasi. Pada ranah ilmiah, penelitian berkontribusi dengan memperkuat argumen *procedural justice* dalam konteks penertiban pelajar oleh otoritas pemerintah daerah: legitimasi terbukti menjadi kanal kunci yang membuat penindakan "bekerja" secara sosial-psikologis.

Walau demikian, interpretasi temuan perlu disertai kehati-hatian. Pengukuran kenakalan berbasis self-report berpotensi bias keinginan sosial dan desain yang bersifat potong lintang membatasi klaim kausalitas yang kuat. Karena itu, riset lanjutan disarankan menggunakan data multi-sumber untuk menguji konsistensi arah hubungan serta daya tahan efek kebijakan dari waktu ke waktu. Dengan penyempurnaan tersebut, kerangka mediasi legitimasi dapat semakin kuat untuk memandu tata kelola penindakan yang bukan hanya tegas, tetapi juga adil, akuntabel dan efektif menekan kenakalan pelajar secara berkelanjutan

REFERENSI

Angkasawati, R. (2022). Peranan satuan polisi pamong praja dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung. *Publiciana*, *5*(5). https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v13i2.173

Bezemer, W. E., Born, M. P., & Leerkes, A. S. (2024). Addressing Ethnic Differences in the Validity of Self-reported Criminal Behaviour Through a Social Desirability Measure. *Journal of Quantitative Criminology*, *40*(2), 257–284. https://doi.org/10.1007/s10940-023-09567-y

Chan, A., Bradford, B., & Stott, C. (2025). A systematic review and meta-analysis of *procedural justice* and legitimacy in policing: the effect of social identity and social contexts. *Journal of Experimental Criminology*, *21*(2), 349–406. https://doi.org/10.1007/s11292-023-09595-5

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. *Modern Methods for Business Research*, *295*(2), 295–336.

Cohen, J. (1998). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (1st Editio). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203771587

Farrington, D. P., Gaffney, H., Lösel, F., & Ttofi, M. M. (2017). Systematic reviews of the effectiveness of developmental prevention programs in reducing delinquency, aggression, and bullying. *Aggression and Violent Behavior*, *33*, 91–106. https://doi.org/10.1016/j.avb.2016.11.003

Fathani, A. T., Putera, R. E., & Mohamed, N. (2024). The Perils of Bureaucratic Inertia: A Steps Toward Enchancing Government Management. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, *8*(1), 49–59. https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.5976

Fry, L. W., & Cohen, M. P. (2009). Spiritual Leadership as a Paradigm for Organizational Transformation and Recovery from Extended Work Hours Cultures. *Journal of Business Ethics*, *84*(S2), 265–278. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9695-2

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, *31*(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Hasan, R., Watson, B., Haworth, N., Oviedo-Trespalacios, O., & Bates, L. (2024). How do perceptions of *procedural justice*, police legitimacy, and legitimacy of laws influence intentions to drug drive? *Journal of Safety Research*, *90*, 86–99. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2024.06.006

Hidayah, N. R. (2020). Kontrol Diri dan Konformitas Terhadap Kenakalan Remaja. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, *8*(4), 657. https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i4.5571

Indrawati, Y. V. (2023). Model Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Pada Program Operasi Kasih Sayang Penertiban Pelajar di Serdang Bedagai. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, *8*(2), 51–57. https://doi.org/10.31289/simbolika.v8i2.6230

Kapoor, S. (2025). The Role of SmartPLS in Optimizing Statistical Analysis: A Case Study Approach. *2025 5th International Conference on Innovative Research in Applied Science, Engineering and Technology (IRASET)*, 1–5. https://doi.org/10.1109/IRASET64571.2025.11008204

Kwak, D.-H. (Austin), Ma, X., & Kim, S. (2021). When does social desirability become a problem? Detection and reduction of social desirability bias in information systems research. *Information & Management*, *58*(7), 103500. https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103500

Latan, H., & Ghozali, I. (2015). *Partial least squares: Concepts, techniques and application using program SmartPLS 3.0*. Semarang: Diponegoro University Press.

Li, J. C. M., Zhang, S. Y., Sun, I. Y., & Ho, A. S. K. (2024). Police legitimacy and *procedural justice* for children and youth: a scoping review of definitions, determinants, and consequences. *Frontiers in Sociology*, *9*. https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1409080

Liu, L., Wang, Y., & Xu, Y. (2024). A Practical Guide to Counterfactual Estimators for Causal Inference with Time-Series Cross-Sectional Data. *American Journal of Political Science*, *68*(1), 160–176. https://doi.org/10.1111/ajps.12723

Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E., & Manning, M. (2013). Legitimacy in Policing: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, *9*(1). https://doi.org/10.4073/csr.2013.1

McGloin, J. M., & Thomas, K. J. (2019). Peer Influence and Delinquency. *Annual Review of Criminology*, *2*(1), 241–264. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011518-024551

Mohammad, T., & Nooraini, I. (2021). Routine activity theory and juvenile delinquency: The roles of peers and family monitoring among Malaysian adolescents. *Children and Youth Services Review*, *121*, 105795. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105795

Muklir, M., & Mustika, S. D. (2020). Performance of Pamong Praja Police Units in Disciplining Students in Timang Gajah District Bener Meriah Regency. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, *1*(2), 154. https://doi.org/10.29103/jspm.v1i2.3143

O, S., & Wilcox, P. (2018). Routine Activity Theory, Target Congruence, and School Context: A Multilevel Analysis of Teacher Victimization. *Victims & Offenders*, *13*(3), 349–372. https://doi.org/10.1080/15564886.2017.1329174

Podsakoff, P. (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. *Journal of Management*, *26*(3), 513–563. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(00)00047-7

Putera, R. E., Fathani, A. T., Lenggogeni, S., & Asrinaldi. (2025). Tourism disaster management dilemmas: Insights from Mandalika, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, *11*(January), 101400. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101400

Ringle, C. M., Sarstedt, M., Sinkovics, N., & Sinkovics, R. R. (2023). A perspective on using partial least squares structural equation modelling in data articles. *Data in Brief*, *48*, 109074. https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109074

Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Becker, J.-M., & Ringle, C. M. (2019). How to Specify, Estimate, and Validate Higher-Order Constructs in PLS-SEM. *Australasian Marketing Journal*, *27*(3), 197–211. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2019.05.003

Sarstedt, M., Hair, J. F., Pick, M., Liengaard, B. D., Radomir, L., & Ringle, C. M. (2022). Progress in partial least squares structural equation modeling use in marketing research in the last decade. *Psychology & Marketing*, *39*(5), 1035–1064. https://doi.org/10.1002/mar.21640

Schuberth, F. (2021). Confirmatory composite analysis using partial least squares: setting the record straight. *Review of Managerial Science*, *15*(5), 1311–1345. https://doi.org/10.1007/s11846-020-00405-0

Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: guidelines for using PLSpredict. *European Journal of Marketing*, *53*(11), 2322–2347. https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189

Tibrani, T., Zabri, S. M., & Hakim, L. (2024). An Analysis of the Relationship between Prices, Shopping Habits, Promotions, and Fashion Involvements in Impulsive Buying Decisions. *Binus Business Review*, *15*(3), 213–223. https://doi.org/10.21512/bbr.v15i3.11001

Tyler, T. R., Goff, P. A., & MacCoun, R. J. (2015). The Impact of Psychological Science on Policing in the United States. *Psychological Science in the Public Interest*, *16*(3), 75–109. https://doi.org/10.1177/1529100615617791

Van Petegem, S., Trinkner, R., van der Kaap-Deeder, J., Antonietti, J., & Vansteenkiste, M. (2021). Police *procedural justice* and adolescents' internalization of the law: Integrating self-determination theory into legal socialization research. *Journal of Social Issues*, *77*(2), 336–366. https://doi.org/10.1111/josi.12425

Vazsonyi, A. T., Mikuška, J., & Kelley, E. L. (2017). It's time: A meta-analysis on the self-control-deviance link. *Journal of Criminal Justice*, *48*, 48–63. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.10.001

Wenzel, M., & Okimoto, T. G. (2016). Retributive Justice. In *Handbook of Social Justice Theory and Research* (pp. 237–256). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3216-0_13

Wood, G., Tyler, T. R., & Papachristos, A. V. (2020). *Procedural justice* training reduces police use of force and complaints against officers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *117*(18), 9815–9821. https://doi.org/10.1073/pnas.1920671117